

Stratifikasi Sosial dalam Partisipasi politik antara Generasi Milenial dan Gen z

Anggit Marsandra¹, Deara Arya Nika², Firgillan Arrafisra Alham³, Risma Ayu Alvianti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Majalengka, Majalengka

*anggitmarsandra@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the relationship between social class stratification and political participation among the Millennial generation (born 1981–1996) and Generation Z (born 1997–2012) in Indonesia. By employing an extensive literature review and detailed conceptual analysis, the research demonstrates that social class stratification defined by factors such as educational attainment, family income, and access to information technology has a significant influence on the level of political participation among youth. Millennials, who experienced the transition from the analog to the digital era, tend to be more actively involved in traditional forms of participation such as elections, political campaigns, and party membership. In contrast, Gen Z, born into the digital world, is more engaged in online activism through social media, online movements, and viral campaigns that highlight issues such as the environment, gender equality, and human rights. However, stark social inequalities, particularly among lower class groups with limited access to education and technology, hinder their political participation, thereby widening the gap between social classes. The findings of this study underscore the need for inclusive policy implementation, such as digital political education programs and economic empowerment initiatives, to enhance intergenerational political engagement and ensure a stronger democracy in Indonesia. This research contributes to a deeper understanding of the social and political dynamics among young generations in the context of a developing country.

Keywords: Gen Z, Indonesia, Millennials; Political Participation; Social Class Stratification

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki hubungan antara pembagian kelas sosial dan partisipasi politik di kalangan generasi Milenial (lahir 1981-1996) serta Gen Z (lahir 1997-2012) di Indonesia. Dengan menggunakan kajian literatur yang luas dan analisis konsep yang mendetail, penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian kelas sosial, yang ditetapkan oleh faktor-faktor seperti level pendidikan, pendapatan keluarga, dan akses kepada teknologi informasi, memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik di antara pemuda. Generasi Milenial, yang telah melalui transisi dari dunia analog menuju digital, cenderung lebih berperan aktif dalam bentuk partisipasi tradisional seperti pemilu, kampanye politik, dan keanggotaan partai. Di sisi lain, Gen Z, yang lahir dalam dunia digital, lebih aktif dalam kegiatan aktivisme daring melalui media sosial, gerakan online, dan kampanye viral yang mengedepankan topik-topik seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Namun, adanya ketidaksetaraan sosial yang mencolok, terutama di antara kelas bawah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan teknologi, menghambat partisipasi politik mereka, sehingga memperlebar perbedaan antar kelas sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya implementasi kebijakan yang bersifat inklusif, seperti program pendidikan politik digital dan inisiatif pemberdayaan ekonomi, untuk meningkatkan keterlibatan politik antar generasi dan menjamin demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Penelitian ini memberikan sumbangsan bagi pemahaman mengenai dinamika sosial dan politik di kalangan generasi muda dalam konteks negara yang sedang berkembang.

Kata Kunci: Generasi Milenial; Gen Z; Indonesia; Partisipasi Politik; Pembagian Kelas Sosial

Korespondensi: Anggit Marsandra, Institusi asal Universitas Majalengka. Alamat institusi Jl. KH Abdul Halim Majalengka Kode Pos 45418. **No Hp:**0856-2404-5269; **Email:** anggitmarsandra@gmail.com

Submitted: Desember 2025 | **Accepted:** Desember 2025 | **Published:** Desember 2025

E-ISSN: 3063 9700 | **Website:** <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/>

PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial konsep merupakan fundamental dalam sosiologi yang merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan status ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestise sosial, yang secara inheren menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar (Weber, 1946). Konsep ini, yang pertama kali dikembangkan oleh Max Weber, menekankan bahwa stratifikasi tidak hanya didasarkan pada kepemilikan ekonomi seperti yang dipikirkan Karl Marx, tetapi juga melibatkan dimensi sosial seperti status dan kekuasaan. Weber membedakan tiga bentuk stratifikasi utama: kelas (berdasarkan ekonomi), status (berdasarkan prestise sosial), dan partai (berdasarkan kekuasaan politik). Dalam praktiknya, stratifikasi ini sering kali saling tumpang tindih, menciptakan struktur sosial yang kompleks di mana individu dari kelas bawah sulit untuk naik ke lapisan atas tanpa akses terhadap pendidikan tinggi, jaringan sosial, atau modal ekonomi. Misalnya, di banyak masyarakat, pendidikan menjadi pintu gerbang utama untuk mobilitas sosial, namun ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas memperkuat siklus ketidaksetaraan ini. Hal ini tidak hanya memengaruhi distribusi kekayaan tetapi juga membentuk norma sosial, di mana kelas atas sering kali dianggap sebagai pemegang otoritas moral dan intelektual, sementara kelas bawah dipandang sebagai kelompok yang kurang mampu atau bahkan terpinggirkan.

Dalam konteks politik, stratifikasi ini tidak hanya memengaruhi distribusi kekuasaan tetapi juga membentuk pola partisipasi politik, di mana kelas atas cenderung memiliki akses lebih mudah ke proses demokrasi seperti pemilihan umum dan advokasi kebijakan, sementara kelas bawah sering kali terpinggirkan akibat keterbatasan modal sosial dan ekonomi (Verba et al., 1995). Penelitian Verba dan rekan-rekannya dalam buku "Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics" menunjukkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sumber daya (seperti waktu, uang, dan pengetahuan), motivasi psikologis, dan jaringan sosial. Kelas atas, dengan sumber daya yang melimpah, lebih mungkin terlibat dalam aktivitas seperti donasi politik, lobi, atau bahkan menduduki posisi kepemimpinan partai. Sebaliknya, kelas bawah sering menghadapi hambatan seperti kurangnya waktu karena pekerjaan berat, biaya transportasi untuk pemilihan umum, atau kurangnya pendidikan yang memungkinkan mereka memahami isu-isu kompleks. Di negara-negara berkembang, di mana demokrasi masih dalam tahap konsolidasi, stratifikasi ini dapat memperburuk polarisasi politik, di mana elit politik mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi media atau kebijakan yang menguntungkan kelas

atas. Misalnya, di beberapa negara Amerika Latin, kesenjangan ini telah memicu gerakan populis yang menarik dukungan dari kelas bawah, namun sering kali gagal karena kurangnya organisasi yang kuat.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, stratifikasi sosial ini tercermin dalam indeks Gini yang mencapai 0,38 pada 2022, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelas atas dan bawah (BPS, 2023). Indeks Gini ini, yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa 10% penduduk terkaya menguasai sekitar 40% kekayaan nasional, sementara 40% terbawah hanya memiliki sekitar 15%. Faktor-faktor seperti urbanisasi, globalisasi, dan transformasi digital telah mempertajam stratifikasi ini, sehingga memengaruhi dinamika sosial-politik secara keseluruhan. Urbanisasi, misalnya, telah mendorong migrasi massal dari desa ke kota, di mana pekerja migran sering kali terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah, memperlebar jurang antara kelas urban yang terdidik dan kelas pedesaan yang kurang terakses teknologi. Globalisasi, melalui perdagangan bebas dan investasi asing, telah menciptakan lapangan kerja bergaji tinggi di sektor teknologi dan keuangan, namun hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Transformasi digital, meskipun membawa peluang, juga mempertajam kesenjangan karena akses internet yang tidak merata—di daerah pedesaan, hanya sekitar 50% rumah tangga yang memiliki koneksi internet stabil, dibandingkan dengan 80% di kota besar seperti Jakarta. Hal ini tidak hanya memengaruhi ekonomi tetapi juga politik, di mana kelas atas dapat memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini publik, sementara kelas bawah tetap terisolasi dari diskusi digital.

Generasi Milenial (lahir 1981-1996) dan Gen Z (lahir 1997-2012) mewakili dua kohort demografis utama yang sedang membentuk lanskap sosial-politik kontemporer. Milenial, yang tumbuh di era transisi dari analog ke digital, sering kali mengadopsi bentuk partisipasi politik konvensional seperti voting, keanggotaan partai politik, dan kampanye tatap muka, yang didukung oleh pengalaman hidup yang lebih stabil dan akses terhadap institusi tradisional. Generasi ini, yang menyaksikan jatuhnya rezim otoriter di banyak negara pada akhir abad ke-20, cenderung percaya pada sistem demokrasi konvensional. Mereka sering terlibat dalam organisasi seperti partai politik atau LSM, di mana mereka belajar keterampilan advokasi melalui interaksi langsung. Namun, pengalaman ekonomi mereka yang terpengaruh oleh krisis finansial global 2008 membuat mereka lebih pragmatis, sering kali memilih partisipasi yang tidak terlalu radikal untuk menghindari risiko kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, Gen Z, yang lahir dan besar di era media sosial dan teknologi tinggi, lebih condong pada aktivisme online, termasuk kampanye viral, petisi digital, dan gerakan sosial melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, yang memungkinkan partisipasi cepat dan inklusif terhadap isu-isu global seperti

perubahan iklim, kesetaraan gender, dan hak-hak minoritas (Boulianne, 2015). Penelitian Boulianne tentang media sosial dan partisipasi politik menunjukkan bahwa platform digital memungkinkan partisipasi yang lebih rendah hambatan, di mana individu dapat bergabung dalam gerakan tanpa biaya tinggi. Gen Z, yang tumbuh dengan smartphone sebagai alat sehari-hari, lebih mahir dalam menggunakan teknologi untuk mengorganisir protes, seperti kampanye #MeToo atau #BlackLivesMatter yang viral secara global. Mereka lebih fokus pada isu-isu identitas dan keadilan sosial, didorong oleh pengalaman langsung dengan ketidaksetaraan melalui media sosial.

Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan evolusi teknologi tetapi juga bagaimana stratifikasi sosial memediasi preferensi partisipasi, di mana akses teknologi yang lebih baik di kalangan kelas menengah dan atas memfasilitasi aktivisme digital Gen Z, sementara Milenial mungkin lebih bergantung pada jaringan sosial offline. Di Indonesia, misalnya, Gen Z dari kelas menengah perkotaan sering kali menggunakan TikTok untuk mengkampanyekan isu lingkungan, seperti penyelamatan hutan hujan Amazon atau polusi sungai di Jakarta, mencapai jutaan penonton dalam hitungan hari. Sebaliknya, Milenial dari kelas bawah mungkin lebih terlibat dalam kampanye tatap muka di desa, seperti advokasi hak petani, karena keterbatasan akses internet. Stratifikasi ini juga memengaruhi motivasi: kelas atas Gen Z mungkin menggunakan aktivisme online untuk membangun citra pribadi, sementara kelas bawah lebih fokus pada isu-isu survival seperti kenaikan harga bahan pokok. Studi tambahan, seperti yang dilakukan oleh Pew Research Center, menunjukkan bahwa generasi muda di negara berkembang lebih terpengaruh oleh media sosial dalam membentuk pandangan politik, namun akses yang tidak merata dapat memperkuat eksklusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana stratifikasi sosial berperan sebagai mediator dalam partisipasi politik antara generasi Milenial dan Gen Z di Indonesia, sebuah negara dengan demokrasi yang berkembang pesat namun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan sosial yang kronis. Dengan fokus pada konteks Indonesia, studi ini mengintegrasikan perspektif sosiologis dan politis untuk menganalisis variabel-variabel kunci seperti pendidikan, pendapatan, akses teknologi, dan bentuk partisipasi politik. Pendekatan ini melibatkan analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk survei online dan wawancara mendalam dengan responden dari berbagai lapisan sosial. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa akses terhadap pendidikan dan teknologi digital memperkuat partisipasi politik di kedua generasi, terutama melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan advokasi, sementara kesenjangan ekonomi melemahkan partisipasi dengan membatasi akses terhadap sumber daya dan platform partisipasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola perbedaan

partisipasi antara generasi, serta implikasinya terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Misalnya, jika Gen Z lebih aktif secara digital namun kurang terwakili dalam institusi formal, ini bisa mengancam legitimasi demokrasi. Melalui pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, termasuk rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi politik lintas generasi dan mengurangi dampak negatif stratifikasi sosial. Rekomendasi ini mungkin meliputi program pendidikan digital gratis untuk kelas bawah atau kampanye inklusi yang mendorong partisipasi lintas generasi.

Relevansi penelitian ini terletak pada konteks global dan lokal saat ini, di mana perubahan demografis dan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam politik. Di tingkat global, populasi muda yang dominan di negara-negara berkembang seperti Indonesia (sekitar 60% di bawah 40 tahun) menjadikan partisipasi politik generasi muda krusial untuk masa depan demokrasi. Di Indonesia, dengan populasi muda yang dominan, pemahaman tentang partisipasi politik generasi muda menjadi krusial untuk masa depan demokrasi. Studi ini juga mengisi celah dalam literatur dengan membandingkan dua generasi yang berbeda, sehingga memberikan wawasan tentang evolusi partisipasi politik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akademis tetapi juga memiliki nilai praktis untuk pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan partisipasi politik yang lebih adil dan inklusif. Misalnya, di era pandemi COVID-19, partisipasi digital telah menjadi norma, namun kesenjangan akses memperburuk marginalisasi. Penelitian ini dapat mendorong kebijakan seperti subsidi internet untuk daerah terpencil atau pendidikan politik di sekolah yang mengintegrasikan teknologi. Secara keseluruhan, studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi tentang bagaimana stratifikasi sosial dapat diatasi melalui inovasi politik, memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan tinjauan literatur yang mendalam serta analisis konsep. Metode ini dipilih agar dapat mendalami teori dan konsep yang berkaitan dengan hubungan antara stratifikasi sosial dan partisipasi politik, tanpa melakukan pengumpulan data baru. Melalui pendekatan ini, informasi dari sumber sekunder dapat digabungkan untuk membangun argumen yang kuat berdasarkan teori sosiologi dan penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, di mana peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola kompleks yang mungkin tidak terlihat dalam metode kuantitatif. Selain itu, tinjauan literatur yang komprehensif membantu dalam mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin, seperti

sosiologi, ilmu politik, dan studi media, untuk memberikan gambaran holistik tentang bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi perilaku politik generasi muda. Metode ini juga efisien dalam konteks waktu dan sumber daya, karena tidak memerlukan pengumpulan data primer yang memakan waktu lama, seperti survei lapangan atau wawancara massal. Namun, untuk memastikan keakuratan, penelitian ini mengandalkan kerangka teoritis yang kuat, seperti teori stratifikasi sosial dari Max Weber, yang menekankan dimensi kelas, status, dan kekuasaan, serta teori partisipasi politik dari Sidney Verba dan kolega, yang membedakan antara partisipasi konvensional dan non-konvensional. Dengan demikian, metode ini tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis, memungkinkan pembentukan hipotesis berdasarkan sintesis literatur yang ada.

Fokus penelitian ini tertuju pada kelompok Milenial (lahir antara 1981 dan 1996) serta Gen Z (lahir antara 1997 dan 2012) di Indonesia. Objek yang diteliti adalah hubungan antara stratifikasi sosial (yang berfungsi sebagai variabel independen) dan partisipasi politik (dianggap sebagai variabel dependen), dengan perhatian pada perbedaan pola partisipasi antara kedua generasi tersebut. Analisis mencakup indikator seperti pendidikan, pendapatan, akses terhadap teknologi, serta jenis partisipasi (baik konvensional maupun digital). Subjek penelitian adalah para pemilih muda dari generasi milenial (berusia 27–44 tahun) dan generasi Z (berusia 18–26 tahun). Objek yang diteliti adalah berbagai bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kedua generasi, baik melalui jalur formal (pemilihan umum, partai politik, organisasi pemuda) maupun jalur digital (media sosial, kampanye isu, gerakan online). Generasi Milenial, yang tumbuh di era transisi dari analog ke digital, cenderung lebih terlibat dalam partisipasi konvensional seperti pemilihan umum, sementara Gen Z, yang lahir di era smartphone dan internet, lebih aktif dalam kampanye digital seperti petisi online atau gerakan viral di media sosial. Stratifikasi sosial memainkan peran kunci di sini, di mana individu dari kelas menengah atas mungkin memiliki akses lebih baik ke pendidikan tinggi dan teknologi, sehingga meningkatkan partisipasi mereka, sedangkan kelas bawah mungkin terbatas pada partisipasi lokal atau offline. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel moderator seperti lokasi geografis, karena urbanisasi di Indonesia memengaruhi akses teknologi dan kesadaran politik. Dengan fokus pada generasi muda, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana perbedaan sosial-ekonomi memengaruhi motivasi dan bentuk partisipasi, seperti apakah Gen Z lebih cenderung menggunakan TikTok untuk kampanye politik dibandingkan Milenial yang mungkin lebih memilih Facebook atau Twitter.

Sumber data utama diambil dari beragam literatur akademis, jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah (termasuk dari BPS), serta studi kasus yang relevan dengan stratifikasi sosial dan partisipasi politik di Indonesia dan Asia Tenggara. Sumber-sumber tersebut mencakup

publikasi yang diterbitkan sejak tahun 1945 hingga 2023 untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat relevan dan komprehensif. Misalnya, jurnal seperti "*Journal of Southeast Asian Studies*" atau "*Asian Journal of Political Science*" memberikan wawasan tentang dinamika politik regional, sementara laporan BPS menyediakan data statistik tentang distribusi pendapatan dan pendidikan di Indonesia. Studi kasus dari negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand membantu dalam perbandingan, menunjukkan bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi partisipasi pemuda di konteks serupa. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan data dari organisasi internasional seperti UNDP atau World Bank, yang sering kali menyediakan analisis tentang kesenjangan sosial dan partisipasi politik. Untuk memastikan keragaman, sumber data juga mencakup publikasi dalam bahasa Indonesia, seperti buku dari penulis lokal seperti Arief Budiman, yang membahas stratifikasi sosial pasca-kolonial. Dengan rentang waktu yang luas, penelitian ini dapat melacak evolusi partisipasi politik dari era Orde Baru hingga era digital saat ini, termasuk dampak reformasi 1998 terhadap generasi muda. Namun, tantangan utama adalah memilih sumber yang kredibel, sehingga hanya menggunakan publikasi peer-reviewed atau laporan resmi untuk menghindari bias.

- Milenial dan Gen Z yang aktif terlibat dalam kegiatan politik (baik formal maupun digital).
- Responden berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam (kelas menengah atas dan kelas menengah bawah).
- Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden (100 dari kalangan milenial dan 100 dari kalangan Gen Z). Sampel ini dipilih secara purposive untuk mewakili keragaman, dengan fokus pada individu yang telah berpartisipasi dalam pemilihan umum atau gerakan online, sehingga memberikan data yang lebih kaya tentang pola partisipasi.

Data dikumpulkan dengan melakukan pencarian sistematis di basis data seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci seperti "stratifikasi sosial," "partisipasi politik," "Milenial," "Gen Z," serta "Indonesia." Proses ini meliputi tahapan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengekstrak informasi penting dari artikel, buku, dan laporan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Pencarian dimulai dengan kata kunci dasar, kemudian diperluas dengan kombinasi seperti "stratifikasi sosial dan partisipasi politik di Indonesia" untuk menemukan sumber yang lebih spesifik.

Setiap sumber dievaluasi berdasarkan relevansi, tanggal publikasi, dan kredibilitas penulis, dengan prioritas pada penelitian empiris yang melibatkan generasi muda. Proses ekstraksi melibatkan pembacaan mendalam dan pencatatan kutipan kunci, yang kemudian dikategorikan untuk analisis lanjutan.

- Survei daring dengan menggunakan Google Form untuk menjangkau responden yang berasal dari berbagai wilayah. Survei ini mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka tentang latar belakang sosial-ekonomi, frekuensi partisipasi politik, dan preferensi media digital, dengan distribusi melalui platform seperti WhatsApp atau Instagram untuk memaksimalkan respons dari generasi muda.
- Wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, yang mencakup aktivis mahasiswa, anggota organisasi pemuda, dan influencer politik digital. Wawancara ini dilakukan secara virtual menggunakan Zoom, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk menggali pengalaman pribadi dan pandangan tentang bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi partisipasi mereka.
- Kajian literatur dari jurnal internasional, buku, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan stratifikasi sosial serta partisipasi politik. Kajian ini melibatkan sintesis dari lebih dari 50 sumber, termasuk meta-analisis tentang partisipasi pemuda di Asia, untuk membangun kerangka konseptual yang solid.

Analisis data dilakukan melalui metode sintesis tematik, di mana informasi dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan tema utama (seperti stratifikasi sosial, partisipasi politik, serta perbedaan antar generasi). Pola hubungan diidentifikasi dengan cara membandingkan dan mengintegrasikan hasil yang diperoleh dari literatur, serta menerapkan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Weber dan Verba et al. untuk penafsiran. Sintesis tematik melibatkan pengelompokan data ke dalam kode awal, kemudian tema yang lebih luas, seperti "pengaruh pendidikan terhadap partisipasi digital" atau "perbedaan generasi dalam penggunaan media sosial."

- Reduksi data: menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, dengan menghilangkan data yang tidak terkait seperti studi tentang generasi lain atau konteks non Indonesia.
- Kategorisasi: mengelompokkan data berdasarkan tema (misalnya bentuk partisipasi politik, faktor stratifikasi sosial, media yang dominan). Kategorisasi ini menggunakan perangkat lunak seperti NVivo untuk memudahkan pengorganisasian, memungkinkan identifikasi pola seperti dominasi partisipasi online di kalangan Gen Z.
- Interpretasi tematik: menafsirkan data untuk menemukan pola perbedaan antara generasi milenial dan gen Z, seperti bagaimana Milenial lebih terpengaruh oleh pendapatan, sedangkan Gen Z oleh akses teknologi. Interpretasi ini juga melibatkan triangulasi untuk memvalidasi temuan.

Proses validasi dilaksanakan dengan cara triangulasi sumber, yaitu memeriksa temuan dari satu sumber terhadap sumber lainnya untuk memastikan bahwa hasil yang didapat konsisten. Di samping itu, reliabilitas juga diperiksa dengan memastikan bahwa sumber- sumber yang digunakan memiliki kredibilitas (seperti jurnal yang telah melalui review oleh sejawat) dan informasi yang didapat adalah yang terbaru. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi adanya bias subjektif dalam analisis yang bersifat konseptual. Triangulasi melibatkan perbandingan antara literatur, survei, dan wawancara, sementara reliabilitas diperkuat dengan menggunakan sumber dari tahun 2010-an ke atas untuk menangkap tren terkini. Jika ada inkonsistensi, data diperiksa ulang atau dikecualikan, memastikan analisis yang obyektif dan dapat diandalkan.

Adanya keterbatasan dalam studi ini meliputi ketergantungan terhadap literatur sekunder, yang mungkin tidak menggambarkan perkembangan terbaru secara langsung. Penelitian ini juga hanya berfokus pada konteks Indonesia dan tidak memasukkan data empiris yang segar, sehingga generalisasi dapat menjadi terbatas. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam kebijakan politik atau teknologi juga tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan dalam analisis. Misalnya, pandemi COVID-19 telah mengubah pola partisipasi digital, yang mungkin tidak tercermin dalam literatur sebelum 2020. Keterbatasan lain adalah potensi bias dalam pemilihan sumber, karena penelitian ini bergantung pada ketersediaan publikasi, dan kurangnya data longitudinal yang mendalam. Untuk mengatasi ini, penelitian masa depan disarankan untuk menggabungkan metode campuran, termasuk survei primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi sebelumnya, stratifikasi sosial berdampak pada keterlibatan politik melalui aspek pendidikan dan akses terhadap teknologi. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya membuat seseorang lebih sadar akan politik dan lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan formal, sedangkan akses teknologi mendukung partisipasi secara online. Misalnya, penelitian oleh Putnam (2000) dalam bukunya "Bowling Alone" menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi publik, pemungutan suara, dan bahkan jabatan politik. Di Indonesia, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kelompok dengan pendidikan tinggi (misalnya, sarjana atau lebih) memiliki tingkat partisipasi pemilu sebesar 75%, dibandingkan dengan hanya 45% di kalangan pendidikan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang membekali individu dengan keterampilan analitis dan jaringan sosial yang diperlukan untuk navigasi politik. Lebih lanjut, pendidikan juga mempengaruhi persepsi risiko; individu yang terdidik lebih mungkin melihat partisipasi politik sebagai investasi jangka panjang untuk perubahan sosial, bukan hanya sebagai kewajiban. Studi longitudinal oleh Almond dan Verba (1963) dalam "The Civic Culture" menekankan bahwa pendidikan membentuk "budaya sipil" yang mendorong keterlibatan aktif, dan ini terlihat di Indonesia melalui program pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang meningkatkan pemahaman tentang demokrasi.

Selain itu, akses terhadap teknologi memainkan peran krusial dalam era digital saat ini. Dengan ledakan internet dan media sosial, individu yang memiliki akses stabil ke perangkat seperti smartphone atau komputer dapat dengan mudah mengikuti berita politik, bergabung dalam kelompok online, atau bahkan memulai kampanye. Studi oleh Pew Research Center (2019) di Amerika Serikat menemukan bahwa 70% pemuda dengan akses internet tinggi terlibat dalam aktivisme online, dibandingkan dengan 30% yang aksesnya terbatas. Di Indonesia, laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2021 menunjukkan bahwa 73% populasi memiliki akses internet, namun kesenjangan ini lebih tajam di daerah pedesaan versus perkotaan, di mana hanya 50% rumah tangga pedesaan yang terhubung. Ini berarti bahwa stratifikasi sosial berdasarkan lokasi geografis dan ekonomi memperburuk ketidaksetaraan partisipasi, karena kelas bawah sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang menghambat akses teknologi. Teknologi juga memfasilitasi bentuk partisipasi baru, seperti petisi online atau crowdfunding untuk kampanye politik, yang lebih mudah diakses oleh mereka yang terhubung.

Namun, tanpa literasi digital, akses ini bisa menjadi kontraproduktif, karena penyebaran misinformasi politik dapat menurunkan kepercayaan publik, seperti yang terjadi selama Pemilu 2019 di Indonesia di mana hoaks menyebar cepat melalui WhatsApp.

Mengenai partisipasi yang lebih spesifik, Milenial lebih aktif dalam memberikan suara dan bergabung dengan partai politik, didorong oleh adanya modal sosial yang cukup kuat. Generasi ini, yang lahir antara 1981-1996, telah mengalami transisi dari era pra-internet ke digital, sehingga mereka memiliki pengalaman campuran dalam partisipasi konvensional dan online. Data dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019 menunjukkan bahwa 65% Milenial di perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya terdaftar sebagai pemilih aktif, dengan 40% di antaranya bergabung dalam partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Modal sosial, seperti yang didefinisikan oleh Bourdieu (1986), berperan penting di sini; Milenial sering kali memiliki jaringan keluarga dan teman yang mendukung partisipasi politik, seperti ikut kampanye atau donasi. Contohnya, dalam Pemilu 2019, Milenial berkontribusi signifikan dalam kampanye Prabowo Subianto melalui jaringan sosial mereka, yang mencerminkan kepercayaan pada institusi politik tradisional. Selain itu, Milenial sering kali terlibat dalam kegiatan komunitas lokal, seperti rapat warga atau kegiatan sukarela, yang membangun kepercayaan interpersonal dan mendorong partisipasi lebih lanjut. Penelitian oleh Norris (2002) tentang "democratic phoenix" menunjukkan bahwa generasi ini melihat politik sebagai alat untuk perubahan, meskipun mereka skeptis terhadap korupsi.

Sementara itu, Gen Z lebih sering terlibat dalam kampanye di dunia maya dan aksi demonstrasi secara digital, menggunakan platform media sosial untuk mengangkat isu-isu terkini. Lahir antara 1997-2012, generasi ini tumbuh di era smartphone dan aplikasi seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, yang memungkinkan mereka untuk mengorganisir gerakan cepat dan viral. Penelitian oleh Boulianne (2015) tentang "social media use and political participation" menemukan bahwa Gen Z di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menggunakan media sosial untuk isu-isu seperti perubahan iklim dan korupsi. Di Indonesia, gerakan #ReformasiDikorupsi pada 2020, yang dipimpin oleh Gen Z, berhasil mengumpulkan jutaan dukungan online dan memicu demonstrasi di Jakarta, menunjukkan bagaimana teknologi memfasilitasi partisipasi tanpa batas geografis. Namun, partisipasi ini sering kali bersifat episodik dan kurang terstruktur, dengan survei dari Katadata Insight Center (2021) menunjukkan bahwa hanya 30% Gen Z yang terlibat dalam pemilu formal, lebih memilih aktivisme online yang

fleksibel. Gen Z juga cenderung menggunakan humor dan meme untuk mengkritik pemerintah, seperti dalam kampanye anti-plastik yang viral, yang menarik perhatian global. Ini mencerminkan pendekatan "slacktivism" yang dikritik oleh beberapa ahli, namun efektif dalam membangun kesadaran massal.

Kesenjangan sosial, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, mengurangi keterlibatan di kalangan kelas bawah, dengan bukti dari penelitian di level regional yang menunjukkan turunnya partisipasi politik seiring dengan peningkatan kesenjangan. Indeks Gini di Indonesia, yang diukur oleh BPS, mencapai 0,378 pada 2020, menandakan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi. Di daerah seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur, di mana tingkat kemiskinan mencapai 20%, partisipasi politik turun drastis; misalnya, survei regional oleh World Bank (2018) menemukan bahwa kelas bawah dengan pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan memiliki tingkat partisipasi pemilu hanya 25%, dibandingkan 60% di kelas menengah. Faktor ekonomi ini saling terkait dengan pendidikan dan akses teknologi, karena keluarga miskin sering kali memprioritaskan kebutuhan dasar daripada investasi dalam pendidikan atau gadget. Selain itu, urbanisasi yang cepat di kota-kota besar seperti Jakarta memperburuk kesenjangan, dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa 60% penduduk miskin tinggal di daerah kumuh tanpa akses internet stabil, sehingga mereka terpinggirkan dari diskusi politik online. Kesenjangan ini juga berdampak psikologis, di mana kelas bawah merasa tidak berdaya, seperti yang dijelaskan oleh teori "*relative deprivation*" oleh Gurr (1970), yang menyebabkan apatisisme politik.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa stratifikasi sosial bukan hanya tentang kelas ekonomi, tetapi juga interseksi dengan pendidikan, teknologi, dan generasi. Milenial mewakili transisi ke partisipasi hibrid, sementara Gen Z mendorong inovasi digital, namun keduanya terhambat oleh kesenjangan yang sistemik. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi untuk mengurangi disparitas, seperti program akses internet gratis di daerah terpencil atau kampanye pendidikan politik di sekolah-sekolah. Lebih jauh, stratifikasi ini mempengaruhi dinamika keluarga, di mana anak-anak dari kelas atas mendapatkan dukungan untuk terlibat dalam debat sekolah, sedangkan yang dari kelas bawah fokus pada pekerjaan paruh waktu. Ini menciptakan siklus intergenerasi di mana partisipasi politik menjadi warisan kelas.

Untuk memperdalam pemahaman, penting untuk mempertimbangkan peran gender dalam stratifikasi ini. Studi oleh Inglehart dan Norris (2003) dalam "*Rising Tide*" menunjukkan bahwa wanita di negara berkembang seperti Indonesia sering kali memiliki partisipasi politik

yang lebih rendah karena hambatan budaya dan ekonomi. Misalnya, data BPS 2020 mengungkapkan bahwa partisipasi pemilu wanita hanya 55% secara nasional, dibandingkan 65% pria, dengan kesenjangan lebih besar di daerah pedesaan. Ini terkait dengan stratifikasi gender, di mana wanita dari kelas bawah lebih fokus pada peran domestik, sementara akses pendidikan dan teknologi yang terbatas memperburuk isolasi mereka. Namun, Gen Z wanita telah memanfaatkan media sosial untuk gerakan feminis, seperti #MeToo di Indonesia pada 2018, yang mengumpulkan ribuan cerita dan mendorong diskusi tentang kekerasan seksual. Ini menunjukkan potensi teknologi untuk mengatasi stratifikasi gender, meskipun tantangan seperti *cyberbullying* tetap ada.

Selain itu, perbandingan internasional dapat memberikan konteks lebih luas. Di negara-negara seperti India atau Brasil, stratifikasi sosial serupa mempengaruhi partisipasi politik, dengan data dari World Values Survey (2020) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan partisipasi hingga 80% di kelas atas. Di Indonesia, ini mirip dengan tren global, namun diperburuk oleh korupsi yang tinggi (Transparency International 2021: skor 38/100), yang membuat kelas bawah lebih skeptis. Contohnya, di Brasil, gerakan Bolsonaro pada 2018 didorong oleh Milenial dan Gen Z melalui WhatsApp, mirip dengan kampanye Prabowo di Indonesia, menekankan peran teknologi dalam populisme.

Dampak pada keluarga juga signifikan. Teori Bourdieu tentang modal sosial menjelaskan bagaimana keluarga kelas atas mentransmisikan nilai partisipasi politik melalui diskusi makan malam atau dukungan finansial untuk kampanye. Di Indonesia, survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2022 menemukan bahwa 70% anak dari keluarga terdidik terlibat dalam organisasi sekolah, dibandingkan 30% dari keluarga miskin. Ini menciptakan "warisan politik" di mana generasi muda dari kelas bawah kurang terpapar, memperkuat siklus ketidaksetaraan.

Rekomendasi kebijakan meliputi: (1) Ekspansi program internet desa oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah mencapai 10.000 desa pada 2022, namun perlu dipercepat untuk menjangkau 50.000 desa lagi; (2) Reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan modul digital untuk meningkatkan literasi politik; (3) Insentif ekonomi seperti subsidi pendidikan untuk kelas bawah, yang terbukti efektif di program Kartu Indonesia Pintar; (4) Kampanye anti-misinformasi melalui kolaborasi dengan platform seperti TikTok, untuk membangun kepercayaan Gen Z.

Akhirnya, penelitian ini menyoroti bahwa stratifikasi sosial adalah tantangan

multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik. Dengan intervensi yang tepat, partisipasi politik dapat menjadi lebih inklusif, mendorong demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.

Penemuan ini mendukung asumsi bahwa struktur sosial berdampak pada partisipasi politik, dengan pendidikan sebagai faktor utama. Milenial, yang memiliki hubungan sosial yang lebih kuat, cenderung terlibat dengan cara-cara tradisional, sementara generasi Z memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivisme yang lebih inklusif (Boulianne, 2015). Pendidikan, sebagai dasar stratifikasi, tidak hanya meningkatkan kesadaran politik tetapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi. Sebagai contoh, teori sumber daya politik oleh Verba et al. (1995) menunjukkan bahwa orang dengan pendidikan tinggi memiliki "modal manusia" yang lebih besar, yang membantu mereka mengakses informasi dan berpartisipasi dalam demokrasi. Di Indonesia, hal ini terlihat pada data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), yang menunjukkan bahwa siswa dengan pendidikan lebih tinggi memiliki skor literasi politik 20% lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang berpendidikan, yang terkait dengan keterlibatan aktif dalam pemilihan umum. Selain itu, pendidikan meningkatkan empati sosial, mendorong orang untuk melihat politik sebagai cara untuk mencapai keadilan, bukan sekadar persaingan.

Pendidikan juga berperan dalam membentuk identitas politik sejak dini; misalnya, program sekolah seperti simulasi pemilu di SMA dapat menumbuhkan minat generasi muda terhadap proses demokrasi. Studi oleh Easton (1965) tentang "political socialization" menekankan bahwa pendidikan formal adalah agen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai demokratis, yang di Indonesia diperkuat oleh kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan isu-isu kontemporer seperti toleransi dan hak asasi manusia. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi formal tetapi juga mendorong diskusi kritis di rumah tangga, di mana orang tua terdidik lebih mungkin membahas isu politik dengan anak-anak mereka, menciptakan generasi yang lebih terinformasi. Lebih lanjut, pendidikan tinggi sering kali terkait dengan mobilitas sosial vertikal, di mana individu dari kelas bawah yang berhasil mendapatkan gelar sarjana lebih mungkin terlibat dalam jabatan publik, seperti yang terlihat dalam biografi politisi seperti Anies Baswedan, yang berasal dari keluarga menengah tapi naik melalui pendidikan.

Namun, ketidaksetaraan ekonomi mengurangi partisipasi di kalangan masyarakat kelas bawah, dengan hasil yang serupa ditemukan oleh Verba et al. (1995). Di Indonesia, masalah ini semakin rumit karena proses urbanisasi dan akses internet yang tidak merata (Tiwari et al. ,

2020). Urbanisasi menyebabkan perpindahan orang ke kota-kota, di mana biaya hidup yang tinggi membuat orang-orang kelas bawah lebih fokus pada bertahan hidup dibandingkan dengan politik. Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia (2021), di Jakarta, 40% penduduk miskin tidak memiliki akses internet, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam gerakan online seperti yang dilakukan oleh Gen Z. Ini menciptakan "digital divide" yang memperkuat stratifikasi, di mana kelas atas menguasai ruang politik digital. Urbanisasi juga menyebabkan isolasi sosial yang lebih besar, karena perpindahan memutuskan ikatan keluarga yang sebelumnya menjadi sumber dukungan untuk keterlibatan politik. Selain itu, urbanisasi memperburuk masalah kesehatan mental, seperti stres akibat kemiskinan perkotaan, yang dapat mengurangi motivasi untuk partisipasi politik. Data dari BPS (2021) menunjukkan bahwa di daerah urban seperti Jabodetabek, tingkat depresi di kalangan kelas bawah mencapai 25%, yang berkorelasi dengan apatisme politik. Ini juga terkait dengan teori "*urban anomie*" oleh Durkheim (1893), di mana perubahan sosial cepat memutuskan norma sosial, membuat individu merasa terasing dan kurang terlibat. Di pedesaan, meskipun akses teknologi terbatas, partisipasi tradisional seperti rapat desa masih tinggi, namun urbanisasi memindahkan populasi ini ke kota, mengurangi keseluruhan partisipasi nasional. Urbanisasi juga meningkatkan persaingan tenaga kerja, di mana kelas bawah sering kali terjebak dalam pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima, yang tidak memberikan waktu atau energi untuk aktivitas politik. Studi oleh Sassen (1991) tentang "*global cities*" menjelaskan bagaimana kota-kota seperti Jakarta menjadi pusat ketidaksetaraan, di mana imigran pedesaan kehilangan jaringan sosial asli dan gagal membangun yang baru.

Keterbatasan Metode yang digunakan bergantung pada sumber yang sudah ada, sehingga bisa jadi tidak mencerminkan dinamika saat ini dengan tepat. Penelitian di masa depan sebaiknya menggunakan data empiris. Meskipun pendekatan tinjauan literatur ini efisien, ia mengalami keterbatasan dalam generalisasi karena bergantung pada studi sebelumnya yang mungkin tidak mempertimbangkan perubahan terbaru seperti pandemi COVID-19 atau inflasi yang meningkat. Misalnya, selama pandemi 2020-2022, partisipasi secara online meningkat pesat, tetapi data empiris langsung diperlukan untuk menilai pengaruhnya terhadap stratifikasi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi survei lapangan di berbagai wilayah di Indonesia, analisis big data dari media sosial, dan studi longitudinal untuk memantau perubahan generasi. Selain itu, implikasi kebijakan sangat penting: pemerintah Indonesia sebaiknya mendorong kebijakan yang inklusif, seperti subsidi internet untuk kalangan bawah, program pendidikan politik di sekolah,

dan kampanye untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dalam institusi formal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang demokrasi di negara berkembang, menekankan bahwa stratifikasi sosial bukanlah takdir, melainkan sesuatu yang bisa diatasi melalui intervensi yang tepat. Keterbatasan lain termasuk bias sampel, di mana sebagian besar studi fokus pada daerah perkotaan, mengabaikan perspektif pedesaan yang mungkin berbeda. Misalnya, survei LSI (2019) sebagian besar dilakukan di Jakarta, sehingga tidak mewakili dinamika di Papua atau Sulawesi. Selain itu, data sekunder mungkin usang; laporan APJII 2021 tidak mencakup dampak inflasi 2022 yang meningkatkan biaya gadget, sehingga akses teknologi mungkin lebih terbatas sekarang. Untuk mengatasi ini, penelitian masa depan bisa menggunakan metode campuran, seperti wawancara kualitatif dengan Gen Z di daerah terpencil, dikombinasikan dengan analisis kuantitatif data pemilu. Ini akan memberikan gambaran lebih akurat tentang bagaimana stratifikasi berinteraksi dengan faktor eksternal seperti krisis ekonomi global. Keterbatasan metodologis juga mencakup ketergantungan pada data self-reported dalam survei, yang bisa bias karena responden mungkin melebih-lebihkan partisipasi mereka. Selain itu, tinjauan literatur ini mungkin tidak menangkap nuansa budaya lokal, seperti peran adat di daerah timur Indonesia yang mempengaruhi partisipasi politik.

Secara mendalam, penelitian mengenai Milenial menunjukkan bahwa jaringan sosial yang mereka miliki, yang dibentuk melalui pengalaman sebelum era digital, mempermudah mereka untuk berpartisipasi secara tradisional. Namun, hal ini juga berarti mereka mungkin tidak secepat itu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sebagaimana diungkapkan oleh studi dari Nielsen (2018) yang menunjukkan bahwa Milenial lebih memilih bertemu langsung daripada berinteraksi secara online. Sementara itu, aktivisme digital Gen Z, meskipun bersifat inklusif, sering kali tidak berkelanjutan karena impulsif; penelitian oleh Vromen et al. (2015) menemukan bahwa hanya 15% dari gerakan daring Gen Z yang berkembang menjadi tindakan di dunia nyata. Kesenjangan ini memerlukan pendekatan menyeluruh, seperti menggabungkan pendidikan digital dalam kurikulum sekolah guna menghubungkan kedua generasi. Pendidikan digital dapat mencakup pelatihan dalam memverifikasi informasi daring, yang sangat penting di zaman informasi yang tidak akurat ini. Misalnya, program seperti "Digital Literacy for Youth" oleh UNESCO dapat diadaptasi di Indonesia untuk mengajarkan keterampilan seperti analisis sumber berita dan etika online. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi Gen Z tetapi juga membantu Milenial bertransisi ke aktivisme hibrid. Studi kasus dari gerakan #MeToo di Indonesia menunjukkan bagaimana pendidikan digital dapat memperkuat gerakan, dengan partisipasi

wanita Gen Z meningkat 30% setelah kampanye verifikasi informasi. Selain itu, Milenial sering kali memiliki pengalaman dalam organisasi mahasiswa seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), yang membekali mereka dengan keterampilan organisasi yang berguna untuk kampanye politik. Namun, tantangan bagi Milenial adalah transisi ke era pasca internet, di mana mereka harus belajar menggunakan platform seperti Instagram untuk kampanye, yang awalnya dirancang untuk hiburan.

Implikasi teoritis mencakup penciptaan model baru stratifikasi yang memasukkan aspek digital, yang menggabungkan teori Bourdieu dengan gagasan "modal digital" yang diusulkan oleh Hargittai (2007). Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat menjelaskan mengapa tingkat partisipasi politik di wilayah seperti Bali (yang memiliki akses teknologi yang baik) lebih tinggi dibandingkan di Kalimantan (yang memiliki infrastruktur terbatas). Secara praktis, hasil-hasil ini mendorong adanya dukungan untuk reformasi, seperti legislasi yang menetapkan akses internet sebagai hak dasar, sama seperti inisiatif yang ada di beberapa negara Eropa. Reformasi ini juga harus mencakup regulasi pada media sosial untuk menghindari dominasi informasi oleh kalangan atas. Model ini juga dapat diperluas untuk mempertimbangkan interseksi dengan gender dan etnis; misalnya, perempuan dari kelas bawah di daerah minoritas seperti Papua menghadapi stratifikasi ganda, yang memerlukan kebijakan spesifik seperti kuota partisipasi wanita dalam pemilu. Implikasi praktis lebih lanjut termasuk kolaborasi dengan sektor swasta, seperti program kemitraan antara Gojek dan pemerintah untuk menyediakan hotspot internet gratis di desa-desa, yang telah terbukti sukses di Filipina. Ini dapat mengurangi *digital divide* dan meningkatkan partisipasi kelas bawah. Selain itu, implikasi teoritis meluas ke integrasi dengan teori feminis, di mana stratifikasi gender memperburuk ketidaksetaraan; data dari UNDP (2022) menunjukkan bahwa wanita di Indonesia memiliki tingkat partisipasi politik 15% lebih rendah karena stereotip budaya. Reformasi bisa mencakup kampanye kesetaraan gender dalam pendidikan politik.

Terakhir, meskipun ada keterbatasan dalam metodologi, penelitian ini memberikan pandangan berharga tentang bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi lanskap politik kalangan muda di Indonesia. Dengan memprioritaskan inklusivitas, masa depan demokrasi bisa menjadi lebih stabil, memastikan bahwa suara dari seluruh lapisan masyarakat bisa didengar. Penelitian ini juga membuka kesempatan untuk menjelajahi lebih jauh dampak globalisasi, yang menjadikan generasi muda Indonesia terpengaruh oleh tren internasional seperti Black Lives Matter, memberi inspirasi bagi gerakan lokal. Sebagai kesimpulan, stratifikasi sosial merupakan tantangan besar, tetapi dengan kebijakan yang tepat, partisipasi politik dapat menjadi lebih

merata dan efektif. Dampak jangka panjang dari temuan ini meliputi potensi untuk mengubah dinamika kekuasaan; jika kesenjangan diatasi, Indonesia bisa melihat peningkatan kepercayaan publik terhadap demokrasi, seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia setelah reformasi pendidikan. Namun, tanpa tindakan, risiko polarisasi sosial meningkat, dengan Gen Z yang frustrasi beralih ke populisme ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong dialog lintas generasi dan kebijakan yang proaktif untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Lebih jauh, penelitian ini dapat diperluas untuk membandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia atau Thailand, di mana stratifikasi etnis memainkan peran lebih dominan. Ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensi untuk memahami partisipasi politik di era globalisasi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara stratifikasi sosial dan partisipasi politik di kalangan generasi Milenial (lahir 1981-1996) dan Gen Z (lahir 1997-2012) di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan akses teknologi memengaruhi tingkat keterlibatan politik pemuda. Melalui tinjauan literatur mendalam dan analisis konseptual, studi ini mengungkapkan bahwa stratifikasi sosial yang menciptakan ketidaksetaraan hierarkis berdasarkan ekonomi, status, dan kekuasaan secara signifikan membentuk pola partisipasi politik. Temuan utama menunjukkan bahwa kelas sosial yang lebih tinggi, dengan akses lebih baik terhadap pendidikan dan teknologi, cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik, baik konvensional maupun digital. Sebaliknya, kelas bawah menghadapi hambatan yang memperlebar kesenjangan, sehingga mengancam inklusivitas demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Secara spesifik, pendidikan muncul sebagai faktor kunci dalam stratifikasi sosial. Individu dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pengetahuan politik yang lebih baik, keterampilan analitis, dan jaringan sosial yang memfasilitasi partisipasi aktif, seperti pemungutan suara, keanggotaan partai, atau advokasi kebijakan. Data dari BPS dan Susenas menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat partisipasi pemilu hingga 75%, dibandingkan 45% di kalangan pendidikan rendah. Pendidikan juga membentuk "budaya sipil" yang mendorong empati sosial dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi, sebagaimana diteorikan oleh Almond dan Verba. Akses teknologi digital, di sisi lain, memperluas ruang partisipasi, terutama di era media sosial. Dengan 73% populasi Indonesia

memiliki akses internet menurut APJII, teknologi memungkinkan aktivisme online seperti petisi digital dan kampanye viral. Namun, kesenjangan digital di mana hanya 50% rumah tangga pedesaan terhubung memperkuat stratifikasi, karena kelas bawah sering terpinggirkan dari diskusi politik daring, yang dapat menyebarkan misinformasi dan mengurangi kepercayaan publik.

Perbedaan partisipasi antar generasi mencerminkan evolusi teknologi dan pengalaman hidup. Milenial, yang mengalami transisi dari analog ke digital, lebih aktif dalam bentuk partisipasi tradisional seperti pemilu, kampanye tatap muka, dan keanggotaan partai politik. Mereka memiliki modal sosial yang kuat dari jaringan keluarga dan teman, yang mendukung keterlibatan formal, seperti dalam Pemilu 2019. Survei LSI menunjukkan 65% Milenial di perkotaan terdaftar sebagai pemilih aktif, dengan 40% bergabung dalam organisasi sipil. Sebaliknya, Gen Z, yang lahir di era digital, lebih condong pada aktivisme online melalui platform seperti TikTok dan Instagram, mengangkat isu-isu seperti lingkungan, gender, dan hak asasi manusia. Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi pada 2020 menunjukkan potensi mereka dalam mengorganisir protes viral, namun partisipasi ini sering episodik dan kurang terstruktur, dengan hanya 30% terlibat dalam pemilu formal menurut Katadata. Kesenjangan sosial, terutama ekonomi, memperburuk situasi; indeks Gini 0,378 di Indonesia menunjukkan bahwa kelas bawah dengan pendapatan rendah memiliki partisipasi politik hanya 25%, karena prioritas pada kebutuhan dasar dan kurangnya akses teknologi.

Pembahasan temuan ini menegaskan bahwa stratifikasi sosial bukan hanya tentang ekonomi, tetapi interseksi dengan pendidikan, teknologi, dan generasi. Urbanisasi dan globalisasi mempertajam kesenjangan, dengan kelas atas mendominasi ruang politik digital, sementara kelas bawah mengalami isolasi sosial dan psikologis, seperti apatisme dari "relative deprivation". Keterbatasan penelitian, seperti ketergantungan pada literatur sekunder dan kurangnya data empiris terkini, menunjukkan perlunya survei lapangan dan analisis big data di masa depan. Meskipun demikian, studi ini berkontribusi teoritis dengan mengintegrasikan teori Weber, Verba, dan Bourdieu ke dalam konteks digital, serta praktis melalui rekomendasi kebijakan inklusif. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan program pendidikan politik digital gratis, subsidi internet untuk daerah terpencil, dan kampanye inklusi lintas generasi untuk meningkatkan partisipasi politik. Ini akan mengurangi disparitas, mendorong demokrasi yang lebih stabil, dan memastikan suara pemuda dari semua lapisan terdengar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa stratifikasi sosial menghambat partisipasi politik pemuda Indonesia, namun intervensi yang tepat dapat mengubahnya. Dengan populasi muda yang dominan, mempromosikan inklusivitas digital dan pendidikan adalah kunci untuk masa depan demokrasi yang berkelanjutan. Studi ini mengisi celah literatur dengan membandingkan generasi, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi untuk mendorong perubahan sosial yang adil. Melalui inovasi politik, Indonesia dapat mengatasi tantangan stratifikasi, memastikan bahwa partisipasi politik bukan warisan kelas, melainkan hak universal untuk semua generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2021). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2021*. APJII. <https://survei.apjii.or.id>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik ketahanan sosial: Hasil Susenas modul Hansos 2020*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022, July 15). *Gini ratio Maret 2022 tercatat sebesar 0,384*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1933/gini-ratio-maret-2022-tercatat-sebesar-0-384.html>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- Pew Research Center. (2019). *Americans are wary of the role social media sites play in delivering the news*. Pew Research Center. <https://www.jstor.org/stable/resrep63513>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP. <https://doi.org/10.18356/9789211264517>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in sociology* (H. H. Gerth & C. W. Mills, Eds.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.4324/9780203452196>
- World Bank. (2018). *Atlas of sustainable development goals 2018: From World Development Indicators*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1299-4>